

PELAKSANAAN UNIT PRODUKSI DI SMK NEGERI DI KABUPATEN PURBALINGGA

IMPLEMENTATION OF PRODUCTION UNIT SMKN PURBALINGGA

Oleh:

Aziz Wahyudi dan Martubi

Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Email: azizwahyudi84@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)sejauhmana tingkat pelaksanaan UP di SMK Negeri di Kabupaten Purbalingga, (2)sejauhmana tingkat pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan UP di SMK Negeridi Kabupaten Purbalingga, (3)faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan UP di SMK NegeridiPurbalingga. Penelitian ini termasukpenelitian survei deskriptif.Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif dengan prosentase dan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat pelaksanaan UP di SMK Negeri di Purbalingga masuk dalam kategori sangat baik denganprosentase sebesar80,69%,(2) tingkat pelaksanaanfungsi-fungsi manajemenUP masuk dalam kategori baik denganprosentase sebesar 78,70% dan (3) Faktor pendukung pelaksanaan UPyakni (a) SDM meliputi dari segi jumlah, kualitas dan pemahaman SDM terhadap UP, (b) Fasilitas dan bahan yaitu dari segi kondisi tempat, jumlah dan kondisi peralatan yang digunakan, relevansi peralatan dengan order yang dikerjakan serta ketersediaan bahan(c) Pendanaan yakni adanya dana bantuan/hibah dari pusat serta jumlah dana operasional yang sudah mencukupi kebutuhan, (d) Order dan produksi yaitu jumlah order, pengerjaan order serta kualitas order yang dihasilkan, sementara faktor penghambat UP antara lain (a) partisipasi siswa yang belum optimal, (b) sarana pendukung yang belum memadai, (c) sulit mendapatkan sumber dana tambahan, (d) jenis order yang kebanyakan sejenis, (e) tenaga pemasaran dan promosi yang belum optimal, jangkauan pemasaran yang belum luas, serta (f) faktor sulitnya menggandeng mitra kerja Unit Produksi.

Kata kunci: Pelaksanaan, Unit Produksi, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Purbalingga

ABSTRACT

This study aims to know: (1) The extent of the implementation of UP in SMKN in Purbalingga, (2)The extent of the implementation of management functions in the management of UP in SMKN in Purbalingga and (3) The supporting factors and obstacle factors in the implementation of UP in SMKN in Purbalingga. This research uses descriptive survey method. While the technique of data analysis using descriptive technique with percentage and descriptive technique. The results showed that: (1) The level of UP implementation in SMKN in Purbalingga regency was categorized very good with percentage of 80,69 %%, (2) The level of implementation of UP management functions at SMKN in Purbalingga district included in category both with a percentage of 78.70%, and (3) supporting factors and obstacles to implementation of UP include: UP supporting factors (a) human resources include in terms of quantity, quality and understanding of human resources to UP, (b) facilities and materials include in terms of the condition of the place, the number and condition of the equipment used, the relevance of the equipment to the order being done as well as the availability of raw materials, (c) the funding of grant funds from the center as well as the amount of operational funding which is sufficient, (d) the order and the production including the number of orders, the workmanship order and quality of orders produced, while the inhibiting factors of the UP include (a) student participation is not optimal, (b) sa (c) difficulty in obtaining additional funding sources, (d) most similar types of orders, (e) unoptimal marketing and promotional staff, lack of marketing coverage, and (f) difficult factors in engaging partners Production Unit.

Keywords: Implementation, Production Unit, SMKN, Purbalingga

PENDAHULUAN

Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berjiwa kompetitif merupakan harapan dari bangsa Indonesia yang dapat ditempuh dengan

beberapa jalan, salah satunya dengan pendidikan kejuruan atau SMK.

Dewasa ini seiring dengan dibukanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) yang akan

membuka pintu persaingan kerja tentunya harus disikapi secara serius oleh dunia pendidikan kejuruan di Indonesia agar dapat menciptakan SDM yang berkualitas untuk menghadapi persaingan di dunia kerja. Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Suharsimi Arikunto (1988:5) mendefinisikan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan khusus yang direncanakan untuk menyiapkan peserta didiknya untuk memasuki dunia kerja tertentu atau jabatan di keluarga, atau meningkatkan mutu para pekerja.

Namun seiring berjalannya waktu belum ada hasil yang menggembirakan dari kinerja pendidikan kejuruan di Indonesia. Hal ini terlihat dari data BPS yang menyebutkan bahwa pada Agustus 2015 jumlah pengangguran terbuka di Indonesia tertinggi berasal dari lulusan SMK yaitu sebesar 1.569.690 atau meningkat sebesar 237.169 daripada setahun lalu. Lalu berdasarkan data Dirjen Pendidikan Menengah dalam Kebijakan Program dan Anggaran Pendidikan Menengah Tahun 2015 menyebutkan bahwa di Indonesia hanya sebesar 75% lulusan pendidikan menengah yang bekerja di pabrik dan jasa, 25% belum mendapat pekerjaan atau menganggur.

Sejalan dengan kondisi tersebut yaitu di kabupaten Purbalingga juga mengalami hal yang serupa, yakni berdasarkan data BPS yang termuat dalam bukunya "Purbalingga dalam Angka" menyebutkan bahwa jumlah pengangguran terbesar di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 berasal dari lulusan SMK yaitu sebesar 7.758 siswa. Sementara itu untuk lulusan SMK

yang sudah bekerja pun terdapat permasalahan yakni kebanyakan lulusan bekerja pada bidang yang tidak relevan dengan bidangnya. Hal ini disampaikan oleh ketua Dinsosnakertrans Purbalingga yang dimuat dalam Radar Banyumas yang menjelaskan bahwa pada awal Desember 2015 di Kabupaten Purbalingga total ada 9.965 pencari kerja dengan rincian 4.982 orang lulusan SMK, 2.551 orang lulusan SMA dan 2.432 orang lulusan SMP. Seluruh pencari pekerja tersebut tertampung pada pabrik kerajinan rambut dan kayu (sumber: <http://radarbanyumas.co.id>)

Dari beberapa hal tersebut mengindikasikan bahwa sampai saat ini pendidikan kejuruan/SMK khususnya di Purbalingga belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan baik dan optimal terutama dalam mewujudkan *link and match* dan menyiapkan calon tenaga kerja.

Menyikapi hal tersebut seharusnya SMK di Kabupaten Purbalingga melakukan upaya untuk membuat proses pendidikan di SMK agar efektif dalam menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja yang relevan. Upaya ini dengan pengembangan terhadap keterampilan, kecakapan, pemahaman sikap, kebiasaan kerja serta nilai-nilai yang diperlukan siswa untuk bekerja.. Salah satu jalan yang dapat diupayakan oleh SMK untuk menjawab hal itu adalah dengan melaksanakan Unit Produksi (UP) SMK.

Bambang Sartono (Detjen Peningkatan Mutu Tendik, 2007:6), menjelaskan Unit Produksi yaitu suatu proses kegiatan usaha yang dilakukan sekolah/madrasah secara berkesinambungan, bersifat akademis dan bisnis dengan memberdayakan warga sekolah /madrasah dan lingkungan dalam bentuk unit usaha produk/jasa

yang dikelola secara profesional. Beliau juga menambahkan bahwa UP juga merupakan suatu usaha *incorporated-entrepreneur* atau suatu wadah kewirausahaan dalam suatu organisasi yang memerlukan kewenangan khusus dari pimpinan sekolah kepada pengelola untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara demokratis. Dari pengertian itu menjelaskan bahwa program UP dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan pendidikan kejuruan selama ini.

Besarnya animo masyarakat Purbalingga untuk memilih pendidikan kejuruan/SMK untuk bersekolah dibandingkan SMA perlumenjadisorotan. Direktorat Jendral Pembinaan SMK menyebutkan bahwa di tahun 2016 Kabupaten Purbalingga terdapat 31 SMK dengan rincian 12 SMK Negeri dan 19 SMK swasta (sumber: <http://datapokok.ditpsmk.net/>). Dalam hal ini kecenderungan masyarakat Purbalingga lebih memilih bersekolah di SMK negeri dibandingkan SMK swasta, hal ini terlihat dari data jumlah siswa di Purbalingga yang dirilis oleh Kemdikbud yang menyebutkan bahwa jumlah siswa SMK di Purbalingga tahun 2016 sebanyak 18.765 siswa dengan rincian sebanyak 10.543 siswa SMK negeri dan 8.222 siswa SMK swasta (sumber: http://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_index.php?). Salah satu alasan kecenderungan lebih banyaknya masyarakat Purbalingga memilih SMK negeri jika dibandingkan dengan SMK swasta karena sekolah negeri relatif lebih murah dan terjamin oleh pemerintah apalagi jika SMK negeri tersebut telah memperoleh penilaian akreditasi yang baik oleh pemerintah.

Mengingat banyaknya lulusan SMK di Purbalingga yang masih banyak yang menganggur serta banyak yang bekerja di industri yang tidak relevan dengan bidangnya perlumena diperhatikan terutama bagi SMK negeri di Purbalingga. Alasannya adalah SMK negeri sebagai tujuan favorit bersekolah masyarakat Purbalingga dengan dibuktikan jumlah siswa yang paling banyak agar jangan sampai menambah banyaknya lulusan yang menganggur di Purbalingga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu jalan SMK agar efektif dalam menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan dunia kerja yang relevan dengan bidangnya maka SMK dapat melaksanakan program Unit Produksi. Banyaknya manfaat yang bisa didapatkan SMK lewat Unit Produksi terutama untuk meningkatkan kualitas lulusan untuk masuk ke dunia kerja maka program ini penting untuk dilaksanakan di setiap SMK.

Namun berdasarkan observasi di SMK-SMK negeri di Kabupaten Purbalingga, ternyata hanya beberapa SMK negeri saja yang telah melaksanakan UP secara berkesinambungan. Beberapa hambatan yang dialami SMK sehingga SMK tidak melaksanakan UP antara lain: kekurangan SDM yang profesional, keterbatasan dana dan sarana prasarana, serta tidak adanya order/pesanan yang masuk sehingga kegiatan tidak berjalan. Peneliti hanya mendapati 2 SMK Negeri saja yang menjalankan UP secara aktif dan berkesinambungan yakni SMKN 1 Purbalingga dan SMKN 2 Purbalingga.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi di SMK saat ini penelitian bermaksud mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana sebenarnya pelaksanaan Unit Produksi yang

dilaksanakan di SMK-SMK Negeri yang ada khususnya yang ada di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini ingin mengetahui sejauhmana tingkat pelaksanaan UP terhadap ketentuan-ketentuan menurut Dikmenjur, sejauhmana tingkat pelaksanaan fungsi-fungsi manajeen UP, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan UP.

Menurut Rusnani (2012) prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan UP yaitu: (1) UP merupakan suatu alternatif yang diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan SMK; (2) penyelenggaraan UP dimaksudkan untuk mendapatkan keahlian profesional; (3) UP merupakan salah satu upaya dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki SMK; (4) UP dikelola secara profesional menganut prinsip manajemen bisnis; (5) UP harus menunjang dan tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar; (6) kegiatan UP yang sudah layak dapat dijadikan sarana belajar dan bekerja (*learning by doing*); (7) keuntungan UP dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMK dan peningkatan kesejahteraan warga SMK; (8) Pembagian keuntungan hasil kegiatan diatur sesuai keputusan manajemen secara profesional, dan (9) UP/J supaya digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan sekolah dalam menjalankan fungsi menyiapkan tenaga kerja menengah.

Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan UP yang dijalankan oleh SMK, penelitian ini mengacu kepada beberapa pendapat yang memuat mengenai keberhasilan pelaksanaan UP. Keberhasilan pelaksanaan UP menurut Dikmenjur yang dikutip Iwa Kuntadi yaitu (1) organisasi dan mekanisme pengelolaan UP; (2) pemasaran produk; (3) keterlibatan guru dan siswa

dalam proses produksi; (4) relevansi program UP dengan program sekolah, (5) mutu hasil pekerjaan, dan (6) manfaat kegiatan UP.

Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan UP SMK menurut Sugiono (2000) dapat ditinjau dari beberapa hal, antara lain: (1) organisasi UP sekolah harus legal/formal, artinya ada SK resmi dan diakui keberadaannya; (2) semua pihak di sekolah terlibat aktif dalam kegiatan UP; (3) UP memiliki organisasi pembukuan; (4) sistem pembagian hasil harus proporsional dan tidak mementingkan satu pihak; (5) pembagian hasil yang dialokasikan untuk tambahan gaji tidak boleh lebih dari 50%; (6) aktivitas UP tidak bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar, lembur adalah hal yang amat terpaksa; (7) UP memiliki satu sistem pelaksanaan; (8) semaksimal mungkin UP memberdayakan sumber daya yang dimiliki sekolah, sehingga ada efek pembelajaran dari aktivitas UP; (9) UP membuat laporan secara berkala. Laporan tersebut dapat diatur mingguan, bulanan, tiap bulanan, setengah tahunan atau satu tahunan; (10) kegiatan UP tidak menghambat proses belajar mengajar tetapi memperlancar proses belajar mengajar..

Berdasarkan beberapa uraian diatas, variabel pelaksanaan UP dalam penelitian ini berdasarkan pada delapan (8) aspek untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan UP yang mengacu pada beberapa uraian yang telah dijelaskan, yaitu: keberadaan UP, tujuan dan manfaat, ruang lingkup usaha, struktur organisasi, mekanisme pelaksanaan, administrasi, unsur-unsur pelaksanaan dan pengelolaan/ manajemen produksi.

Variabel pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen UP dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Gibson et all (1996:4) yang

menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasi berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Pengaturan manajemen dilakukan melalui proses berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Ada tiga (3) fungsi utama manajemen menurut Gibson *et all* (1996: 137) yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

Fungsi perencanaan menurut Gibson *et all* (1996:174) diartikan sebagai sekumpulan langkah-langkah yang berhubungan yang dengannya manajemen menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana akan dilaksanakan. Hani Handoko (2003: 23) menambahkan bahwa perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metoda, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Fungsi pengorganisasian menurut Malayu Hasibuan (2007: 118) adalah suatu proses menentukan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat –alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sedangkan menurut Hani handoko (2003: 167) pengorganisasian diartikan sebagai proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Fungsi pengorganisasian menurut Gibson *et all* (1996: 233) meliputi pembagian seluruh tugas ke dalam berbagai kerja individual

dengan wewenang dan tanggung jawab tertentu untuk menjalankan kerja tersebut.

Fungsi pengendalian menurut George R Terry dalam Malayu Hasibuan (2007: 242) didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Gibson *et all* (1996:301) menjelaskan fungsi pengendalian meliputi seluruh aktivitas yang dijalankan manajer dalam berupaya untuk menjamin agar hasil-hasil aktual sesuai dengan yang direncanakan.

Sementara itu untuk variabel faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan UP maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Faktor pendukung merupakan segala hal yang ada pada sekolah dan dijadikan sebagai daya dukung untuk kelancaran pelaksanaan program UP. Faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang tidak mendukung atau cenderung menghambat dalam pelaksanaan UP. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan UP tidak hanya terbatas pada proses produksi dan kualitas produksi saja, namun melingkupi semua unsur-unsur yang terkait dengan pengelolaan, antara lain: sumber daya manusia (SDM), fasilitas dan bahan, order dan produksi, dana/anggaran, pemasaran dan kerjasama

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei deskriptif (*descriptive survey*). Menurut Morissan (2015: 166) menjelaskan bahwa survei deskriptif berupaya menjelaskan atau mencatat kondisi atau sikap untuk menjelaskan apa yang

ada saat ini. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa survei deskriptif berupaya untuk mengungkapkan situasi saat ini terkait dengan suatu topik studi tertentu. penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran umum tentang pelaksanaan UP di SMK Negeri di Kabupaten Purbalingga tanpa melakukan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel-variabelnya.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 1 Purbalingga dan SMKN 2 Purbalingga. Waktu penelitian dilakukan selama 3 Bulan yaitu pada bulan 15 Oktober sampai dengan 15 Desember 2016.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kegiatan UP yang dilaksanakan di SMK yang bersangkutan. Subjek penelitian ini adalah pelaksana/pengelola UP SMKN 1 Purbalingga dan SMKN 2 Purbalingga. Sumber data penelitian adalah pengelola UP tingkat jurusan yang melaksanakan UP dan ketua/koordinator UP tingkat sekolah.

Variabel Penelitian dan Definisi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga (3) buah variabel penelitian yaitu: (1) tingkat pelaksanaan UP yaitu skor yang dicapai dalam pelaksanaan UP terhadap beberapa aspek pelaksanaan yang didasarkan pada panduan pelaksanaan UP, (2) tingkat pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen UP yaitu skor yang dicapai dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan dalam pelaksanaan UP, dan (3) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan UP, faktor pendukung yaitu segala hal yang ada pada sekolah dan dijadikan sebagai daya dukung untuk kelancaran

pelaksanaan program UP sedangkan faktor penghambat yaitu segala sesuatu yang dianggap kurang mendukung atau cenderung menghambat dalam pelaksanaan UP secara maksimal.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sah atau valid tentang gambaran yang sebenarnya mengenai objek penelitian maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Instrumen Penelitian dan Validitas Instrumen

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, penelitian menggunakan instrumen berupa *checklist* dan pedoman wawancara. *Checklist* digunakan untuk mendapatkan informasi dari pengelola UP jurusan sebagai data utama yang terdiri dari 3 macam yaitu *checklist* pelaksanaan UP, *checklist* pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen UP, dan *checklist* faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan UP. Untuk pengambilan data tentang pelaksanaan UP dan Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen UP digunakan *checklist* pelaksanaan UP dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen UP untuk ditujukan kepada ketua/pengelola UP tingkat jurusan yang melaksanakan UP. *Checklist* menggunakan alat ukur berupa lembar angket/kuesioner bersifat tertutup berskala Guttman dengan dua alternatif jawaban yaitu “Ya” dan “Tidak” sehingga responden tinggal memberikan tanda centang pada salah satu jawaban yang sesuai. Adapun pedoman penskoran untuk *checklist* ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pedoman penskoran skala Guttman

Jawaban	Skor
Ya	1
Tidak	0

Checklist faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan UP digunakan sebagai pedoman dalam mengambil data mengenai faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan UP dan ditujukan kepada ketua/pengelola UP jurusan. Pada instrumen ini peneliti akan menanyakan terkait apa yang ada di dalam instrumen terkait faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan UP kemudian peneliti tinggal mengkategorikan jawaban responden tersebut pada jawaban yang sudah disediakan.

Pengujian validitas instrumen penelitian ini menggunakan validitas isi (*content validity*) dan validitas konstruksi (*construct validity*) karena instrumen tersebut disusun berdasarkan teori yang dipakai. Secara teknis validitas instrumen dilakukan dengan mengkonsultasikan kepada para ahli dalam bidang keilmuan terkait yaitu kepada Bapak Prof. Dr. Herminarto Sofyan, M.Pd dan Bapak Dr. Tawardjono Usman, M.Pd.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif dengan prosentase dan teknik deskriptif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan prosentase digunakan untuk menganalisis data pelaksanaan UP dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen UP. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan persentase yang dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{skor hasil penelitian}}{\text{skor ideal maksimum}} \times 100\%$$

Sugiyono (2010:137)

Setelah didapatkan hasil perhitungan data penelitian maka akan diperoleh data berupa prosentase, kemudian data tersebut akan diinterpretasikan dalam bentuk kalimat kualitatif dengan berpedoman seperti berikut:

Tabel 2. Interpretasi data penelitian

Hasil Pencapaian	Kalimat Interpretasi
80% - 100%	Sangat baik
60% - 79,99%	Baik
40% - 50,99%	Sedang
20% - 39,99%	Buruk
0% - 19,99%	Buruk sekali

Riduwan (2007:15)

Sementara untuk data faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan UP selanjutnya akan dianalisis dengan teknik deskriptif. Data akan dianalisis dengan jalan mereduksi dan menyeleksi jawaban responden sesuai dengan informasi yang diinginkan untuk selanjutnya dikategorikan ke dalam faktor pendukung atau penghambat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Tingkat pelaksanaan UP di SMK Negeri di Purbalingga.

Data variabel pelaksanaan UP di SMK Negeri di Purbalingga terdiri dari 8 aspek seperti yang sudah dijelaskan. Data-data yang diperoleh dari berbagai cara kemudian di analisis dan di cek kebenaran jawabannya. Berdasarkan data yang telah diperoleh, kemudian data dianalisis dengan hasil seagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Pelaksanaan Unit Produksi di SMKN di Kabupaten Purbalingga

No	Aspek/Indikator	Prosentase (%)		Prosentase rata-rata dan kalimat interpretasi
		SMKN 1 PBG	SMKN 2 PBG	
1	Keberadaan UP	79,17	81,25	80,21% (Sangat baik)
2	Tujuan dan	95,24	85,71	90,48%

No	Aspek/Indikator	Prosentase (%)		Prosentase rata-rata dan kalimat interpretasi
		SMKN 1 PBG	SMKN 2 PBG	
	Manfaat			(Sangat baik)
3	Ruang Lingkup Usaha	77,78	79,17	78,47% Baik
4	Struktur Organisasi	85,71	67,86	76,79% (Baik)
5	Mekanisme Pelaksanaan	81,82	79,55	80,68% (Sangat baik)
6	Administrasi	94,44	66,67	80,56% (Sangat baik)
7	Unsur-Unsur Pelaksanaan	61,40	69,74	65,57% (Baik)
8	Pengelolaan Produksi	87,88	84,09	85,98% (Sangat baik)
Rarata semua aspek		82,93	76,75	79,84% (Baik)

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat pelaksanaan UP di SMK Negeri di Kabupaten Purbalingga masuk kategori baik dengan rerata prosentase sebesar 79,84%. Adapun untuk per aspek adalah sebagai berikut:

1. Aspek keberadaan UP masuk dalam kategori sangat baik dengan prosentase rerata 80,21%. Pencapaian SMKN 1 Purbalingga masuk dalam kategori baik dengan perolehan 79,17% dan pencapaian SMKN 2 Purbalingga masuk kategori sangat baik dengan memperoleh 81,25%.
2. Aspek Tujuan dan Manfaat masuk kategori sangat baik dengan prosentase 90,48%. Pada SMKN 1 Purbalingga dan SMKN 2 Purbalingga sama-sama masuk kategori sangat baik dengan prosentase berturut-turut sebesar 95,24% dan 85,71%.
3. Aspek ruang lingkup usah masuk kategori baik dengan prosentase 78,47%. Pencapaian pada kedua SMK Negeri sama-sama masuk

kategori baik dengan prosentase berturut-turut sebesar 77,78% dan 79,17%.

4. Aspek struktur organisasi UP masuk kategori baik dengan prosentase rerata 76,79%. Pencapaian di SMKN 1 Purbalingga masuk kategori sangat baik dengan prosentase 85,71%, dan SMKN 2 Purbalingga masuk kategori baik dengan prosentase 67,86%.
5. Aspek mekanisme pelaksanaan masuk kategori sangat baik dengan prosentase 80,68%. SMKN 1 Purbalingga masuk kategori sangat baik dengan prosentase 81,82%, sementara itu SMKN 2 masuk kategori baik dengan 79,55%.
6. Aspek administrasi masuk kategori sangat baik dengan prosentase 80,56%. Pada SMKN 1 Purbalingga masuk kategori sangat baik dengan prosentase 94,44% dan SMKN 2 masuk kategori baik dengan 66,67%.
7. Aspek Unsur-Unsur Pelaksanaan masuk kategori baik dengan prosentase 65,57%. Pada SMKN 1 dan 2 Purbalingga masuk kategori baik dengan prosentase berturut-turut sebesar 61,40 dan 69,74%.
8. Aspek pengelolaan produksi masuk kategori sangat baik dengan prosentase 85,98%. Pencapaian SMKN 1 dan 2 Purbalingga masing-masing sebesar 87,88% dan 84,09%.

Secara umum pelaksanaan UP di SMKN 1 Purbalingga masuk kategori sangat baik dengan prosentase sebesar 82,93% dan SMKN 2 masuk kategori baik dengan prosentase 76,76%.

- a. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di UP di SMKN di Kabupaten Purbalingga

Data variabel pelaksanaan fungsi manajemen UP di SMK Negeri di Purbalingga terdiri dari 3 aspek, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Data yang

diperoleh kemudian dihitung dan diprosentasekan seperti dibawah ini

Tabel 4. Tingkat Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Unit Produksi di SMKN di Kabupaten Purbalingga

No	Aspek/indikator	Prosentase (%)		Prosentase rata-rata dan kalimat interpretasi
		SMKN 1 PBG	SMKN 2 PBG	
1	Perencanaan	83,33	79,17	81,25% (Sangat baik)
2	Pengorganisasian	77,78	75	76,39% (Baik)
3	Pengendalian	77,78	79,17	78,70% (Baik)
Rerata total		79,63	77,78	78,70 (Baik)

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa tingkat pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen UP di SMK Negeri di Kabupaten Purbalingga masuk kategori baik dengan rerata prosentase sebesar 78,70%. Adapun untuk per aspek adalah sebagai berikut:

1. Pada aspek fungsi perencanaan UP masuk dalam kategori sangat baik dengan perolehan prosentase 81,25%. Untuk pencapaian SMKN 1 Purbalingga masuk kategori sangat baik dengan prosentase 83,33%, dan SMKN 2 Purbalingga masuk dalam kategori baik dengan prosentase 79,17%.
2. Pada aspek fungsi pengorganisasian UP masuk dalam kategori baik dengan prosentase rerata sebesar 76,39%. Pada SMKN 1 dan SMKN 2 Purbalingga sama-sama masuk kategori baik dengan prosentase masing-masing berturut-turut 77,78% dan 75%.
3. Pada aspek fungsi pengendalian masuk dalam kategori baik dengan rerata prosentase sebesar 78,70%. Pencapaian pada SMKN 1 dan SMKN 2 Purbalingga sama-sama masuk

dalam kategori baik dengan pencapaian prosentase masing-masing sebesar 77,78% dan 79,17%.

Secara umum pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen UP di SMKN 1 Purbalingga dan SMKN 2 Purbalingga sama-sama masuk kategori baik dengan prosentase berturut-turut sebesar 79,63% dan 77,78%.

c. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan UP di SMK Negeri di Purbalingga.

Faktor pendukung dan penghambat UP berasal dari unsur-unsur manajemen UP yang terdiri dari 6, yaitu SDM, Fasilitas dan bahan, Order dan Produksi, dana/anggaran, pemasaran dan kerjasama.

Tabel 5. Faktor pendukung UP di SMKN Purbalingga

No	Aspek	Indikator pendukung
1	SDM	segi jumlah, kualitas dan pemahaman SDM terhadap UP
2	Fasilitas dan bahan	segi kondisi tempat, jumlah dan kondisi peralatan yang digunakan, relevansi peralatan dengan order yang dikerjakan serta ketersediaan bahan baku
3	Order dan Produksi	jumlah order, pengerjaan order serta kualitas order yang dihasilkan
4	dana/anggaran	adanya dana bantuan dari pusat serta jumlah dana operasional yang sudah mencukupi kebutuhan,
5	Pemasaran	-
6	kerjasama	-

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa yang umumnya menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan UP adalah sumber daya yang dimiliki

oleh sekolah baik itu SDM, sarana prasarana maupun dana. Selain itu permintaan order yang masuk dan kualitas produk UP juga menjadi faktor pendukung tersendiri bagi UP

Kemudian data mengenai faktor penghambat pelaksanaan UP di SMK Negeri di Purbalingga yaitu:

Tabel 6. Faktor penghambat pelaksanaan UP di SMKN Purbalingga

No	Aspek	Indikator pendukung
1	SDM	partisipasi siswa yang belum semuanya optimal
2	Fasilitas dan bahan	sarana pendukung yang belum memadai
3	Order dan Produksi	jenis order yang kebanyakan sejenis
4	dana/anggaran	sulit mendapatkan sumber dana tambahan
5	Pemasaran	tenaga pemasaran dan promosi yang belum optimal
6	kerjasama	sulitnya menggandeng mitra kerja Unit Produksi

Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan UP ada dari beberapa hal, seperti: dari SDM siswa yang keterlibatannya belum optimal, fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan yang belum ada, sulitnya mendapatkan dana/modal tambahan, jenis order yang cenderung itu-itu saja sehingga sangat bergantung pada satu produk saja, pemasaran produk UP yang belum optimal, serta sulitnya menggandeng mitra kerja untuk dapat diajak bekerjasama karena masih belum banyak industri sejenis di kabupaten Purbalingga..

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan pada

bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pelaksanaan UP masuk dalam kategori baik dengan perolehan skor pencapaian rata-rata sebesar 79,84%. Hal ini mengindikasikan bahwa SMK telah melaksanakan UP dengan baik sesuai dengan pedoman UP yang ada.
2. Tingkat pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen UP masuk dalam kategori baik, dengan pencapaian rata-rata untuk semua fungsi manajemen sebesar 78,70%. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen UP dalam pelaksanaannya sudah melakukan langkah-langkah manajemen dengan baik.
3. Faktor yang pendukung yaitu (1) faktor SDM meliputi dari segi jumlah, kualitas dan pemahaman SDM terhadap UP, (2) faktor fasilitas dan bahan meliputi dari segi kondisi tempat, jumlah dan kondisi peralatan yang digunakan, relevansi peralatan dengan order yang dikerjakan serta ketersediaan bahan baku, (3) faktor pendanaan yakni adanya dana bantuan dari pusat serta jumlah dana operasional yang sudah mencukupi kebutuhan, (4) faktor order dan produksi meliputi dari jumlah order, pengerjaan order serta kualitas order yang dihasilkan.
4. Faktor yang menghambat yaitu partisipasi siswa yang belum optimal, sarana pendukung yang belum memadai, sulit mendapatkan sumber dana tambahan, jenis order yang kebanyakan sejenis, tenaga pemasaran dan promosi yang belum optimal, jangkauan pemasaran yang belum luas, serta faktor sulitnya menggandeng mitra kerja Unit Produksi.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dapat dikemukakan implikasi hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dengan diketahunya tingkat pelaksanaan UP yang baik, tetapi dengan pengelolaan yang belum berjalan optimal, berarti sekolah masih perlu melakukan usaha-usaha pembenahan untuk meningkatkan pelaksanaan UP agar berjalan sesuai harapannya. Langkah-langkah ini dapat dilihat dari bagaimana UP merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan UP sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
2. Dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen UP yang cukup sederhana ternyata masih kurang mengakomodasi terhadap kekurangan-kekurangan yang dialami baik yang bersifat internal maupun eksternal organisasi UP sendiri. Sehingga diperlukan usaha yang lebih keras lagi untuk meningkatkan manajemen yang telah berjalan.
3. Sekolah perlu memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang dialami UP. Optimalisasi faktor-faktor pendukung yang ada agar dapat menjadi tambahan dan menemukan potensi lain sehingga mampu dijadikan aset untuk pelaksanaan UP. Berkaitan dengan faktor-faktor penghambat yang muncul maka pihak sekolah harus selalu mengupayakan solusi untuk mengatasinya agar pelaksanaan UP dapat berjalan dengan baik.
4. Dari hasil penelitian diketahui letak-letak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan UP di tingkat jurusan, maka hasil penelitian ini dapat membantu sekolah dalam mendapatkan informasi kepada sekolah dan

UP, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk penyelenggaraan UP di SMK dan berupaya untuk selalu mengembangkannya.

Saran – Saran

1. Untuk dinas pendidikan terkait karena dalam penyelenggaraan UP di SMK Negeri di Kabupaten Purbalingga masih mengalami beberapa hambatan maka perlu ditingkatkan pembinaan terhadap para pengelola UP setiap jurusan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan latihan kerja yang berorientasi pada produksi kepada seluruh pengelola UP sehingga wawasan berwirausaha pengelola UP dapat meningkatkan pengelolaan serta pelaksanaan UP ke arah lebih baik.
2. Untuk meningkatkan produktifitas UP, jurusan perlu senantiasa membenahi dan meningkatkan kinerja organisasi UP terutama dalam meningkatkan manajemen dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen tersebut.
3. Organisasi UP yang sudah ada hendaknya dilengkapi dengan badan riset dan pengembangan UP sekolah agar dapat merespon gejala dan kondisi yang ada yang kemudian merumuskannya menjadi langkah-langkah terbaik dalam memajukan pelaksanaan UP.
4. Bagi peneliti yang tertarik dalam penelitian mengenai pelaksanaan UP masih bersifat deskriptif, untuk itu perlu diadakan penelitian lanjutan guna membentuk format pelaksanaan UP sekolah yang lebih baik.

Keterbatasan Penelitian

Kesempatan untuk menggali informasi dari responden tidak menyeluruh, hanya pengelola

UP yaitu ketua UP tingkat sekolah dan ketua UP jurusan. Dalam hal ini penelitian belum melibatkan staff UP, guru dan siswa untuk terlibat sebagai responden karena waktu penelitian yang terbatas sehingga informasi masih banyak yang kurang terutama yang terkait pada siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2014). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi Tahun 2002-2014*. Diakses dari (https://www.bps.go.id/website/tabelExcel/Indo/indo_06_4.xls) Tanggal 12 Mei 2016.
- Detik.com. (2015). *Penyebab Banyaknya Lulusan SMK Menganggur*. Diakses dari (<http://news.detik.com/berita/3064402/banyak-lulusan-smk-menganggur-menterihanif-ada-dua-penyebabnya>) tanggal 19 Mei 2016.
- Direktorat Pembinaan SMK. (2015). *Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019*. Kemdikbud.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2007). *Manajemen Unit Produksi/Jasa Sebagai Sumber Belajar Siswa dan Penggalan Dana Pendidikan Persekolahan*. Jakarta: Dirjen PMPTK, Depdiknas.
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., Donnelly. (1996). *Manajemen jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Iwa Kuntadi. *Studi Evaluatif Pelaksanaan Unit Produksi DI BLPT Bandung*.
- Hani Handoko. (2003). *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi UGM.
- Malayu Hasibuan.(2007). *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah*. Ed.Revisi, Cet.6- jakarta: Bumi Aksara
- Morissan. (2015). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Riduwan. (2009). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rusnani. (2012). *Pelaksanaan Unit Produksi Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kelompok Bisnis dan Manajemen di Banjarmasin*. Jurnal Tesis. Yogyakarta: UNY. Dalam <http://journal.uny.ac.id>. Diakses tanggal 15 Januari 2016.
- Sugiono. (2000). *Pelaksanaan dan Upaya Pengembangan Unit Produksi di SMKN 5 Banjarmasin*. Skripsi. UNY
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (1988). *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Jakarta: Depdikbud.